

Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap di Desa Molona Kabupaten Buton Selatan

Nilawati Wagola^{1*}, La Didi¹, Wa Ode Arsyiah¹

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: nilawatiwagola@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 9 Juli 2025

Revised: 5 Agustus 2025

Accepted: 31 Agustus 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap Di Desa Molona Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan. Metode penelitian menggunakan yakni deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada indikator akses informasi dengan adanya komunikasi dua arah aliran informasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat nelayan sudah berjalan dengan baik dan efektif, Pada indikator *Inklusi* atau partisipasi belum optimal, hal ini ditunjukkan bahwa masyarakat nelayan belum dapat dikategorikan sebagai *ko-produsen* karena peran mereka masih terbatas pada penangkapan dan penjualan ikan masih secara segar, tanpa keterlibatan dalam pengolahan atau produksi lanjutan. Pada indikator Akuntabilitas sudah baik, hal ini dapat ditunjukkan bahwa pemerintah telah menyediakan Kartu Kusuka sebagai identitas resmi nelayan untuk mengakses bantuan dan asuransi. Sementara itu pada indikator kapasitas organisasi lokal sudah berjalan dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat nelayan telah menunjukkan kemampuan kerja sama yang baik melalui komunikasi dan koordinasi yang efektif, serta perencanaan bantuan yang mendukung kebutuhan nelayan.

Kata kunci: Pemberdayaan, Masyarakat, Nelayan Tangkap

Abstract

The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques, observation, interviews and documentation. Data analysis, namely, data collection, data reduction, data coding, and drawing conclusions. The results of the study show that in the information access indicator with the existence of two-way communication, the flow of two-way information between the village government and the fishing community has been running well and effectively, in the Inclusion or participation indicator it is not optimal, this is indicated that the fishing community cannot be categorized as co-producers because their role is still limited to catching and selling fresh fish, without involvement in processing or further production. In the Accountability indicator it is good, this can be shown that the government has provided the Kusuka Card as an official identity for fishermen to access assistance and insurance. Meanwhile, in the local organizational capacity indicator it has been running well, this shows that the fishing community has demonstrated good cooperation skills through effective communication and coordination, as well as assistance planning that supports the needs of fishermen.

Keywords: Community, Empowerment, Fishing Fishermen

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya strategis untuk melepaskan masyarakat dari jerat kemiskinan dan keterbelakangan sosial. Konsep pemberdayaan menekankan pada penguatan kapasitas individu maupun kelompok dalam mengelola sumber daya secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan (Chambers, 2014). Melalui proses pemberdayaan, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan, mengelola potensi lokal, serta menentukan arah kebijakan yang menyentuh kepentingan mereka secara langsung. Masyarakat yang proaktif dalam proses pemberdayaan akan lebih mudah keluar dari lingkaran kemiskinan karena memiliki daya dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi serta pengambilan keputusan (Sen, 2001); (Narayan, 2002).

Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat telah menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana, prasarana, akses modal, dan pendampingan berkelanjutan. Namun, hingga kini, kemiskinan di kalangan masyarakat nelayan masih menjadi fenomena yang kontras dengan potensi sumber daya kelautan Indonesia yang sangat besar (Kusnadi, 2003). Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2022), sekitar 98,7% nelayan Indonesia tergolong nelayan kecil, dan 25,14% dari total penduduk miskin nasional merupakan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan tangkap. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya laut belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir.

Tujuan utama pemberdayaan adalah membantu masyarakat yang menghadapi masalah sosial agar mampu bangkit, memiliki daya, dan mandiri dalam menentukan arah kehidupannya (Sulistiani, 2017), sedangkan menurut (Didi, 2024) tujuan pemberdayaan adalah masyarakat yang mandiri dan sejahtera. Dalam konteks pembangunan daerah, partisipasi pemerintah desa dan lembaga masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan program pemberdayaan. Hal ini sesuai dengan pandangan (Narayan, 2002) bahwa pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendorong sinergi dalam penyelesaian permasalahan sosial.

Di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, terdapat 1.750 jiwa penduduk, dengan mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Berdasarkan data dari kantor desa, terdapat sekitar 255 orang yang menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Sejak tahun 2022, pemerintah daerah telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat nelayan berupa bantuan kapal, mesin, dan alat tangkap. Namun, program tersebut masih dinilai belum optimal karena terbatasnya jumlah bantuan dan kurangnya pendampingan teknis dari pihak pemerintah desa. Permasalahan yang dihadapi para nelayan meliputi keterbatasan alat tangkap seperti pancing, rumpon, dan kapal, serta minimnya akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan. Kondisi ini menghambat peningkatan kapasitas nelayan untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial-ekonomi dan teknologi perikanan (Amri & Maulana, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat serta dukungan pemerintah lokal. Firna (2023) dalam penelitiannya di Desa Banabungi, Kabupaten Buton Selatan, menemukan bahwa pemberdayaan nelayan tangkap melibatkan tiga aspek utama, yakni *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian (Harland, 2022), yang menekankan pentingnya akses terhadap sumber daya ekonomi, pendampingan, serta tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjamin keberlanjutan program pemberdayaan.

Terlepas dari besarnya potensi kelautan Indonesia, telah banyak penelitian secara konsisten mengungkapkan paradoks yang terus-menerus antara sumber daya pesisir yang melimpah dan kemiskinan yang mengakar di antara masyarakat nelayan. Berbagai temuan penelitian sebelumnya sebagian besar menekankan intervensi ekonomi dan teknis, namun dinamika sosial politik, gender, dan kelembagaan yang mendukung pemberdayaan masih kurang dieksplorasi.

Menurut (Stacey et al., 2021) menganalisis keberlanjutan mata pencaharian dalam perikanan skala kecil di seluruh Indonesia, menyoroti bagaimana implementasi kebijakan yang terfragmentasi dan kapasitas kelembagaan yang terbatas membatasi hasil pemberdayaan. Demikian pula, (Cahaya, 2015) mengungkapkan bahwa kemiskinan nelayan

sering berlanjut karena ketergantungan struktural dan kurangnya mekanisme penguatan kelembagaan lokal.

Kemudian (Latief & Wijaya, 2025), memperluas wacana dengan meneliti peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan, namun penelitian ini berfokus secara sempit pada mekanisme administrasi tanpa menilai instansi dan kapasitas adaptif masyarakat. Sementara itu, (Syahza et al., 2025) membahas strategi pemberdayaan ekonomi lintas sektoral tetapi gagal memperhitungkan saling ketergantungan sosial-ekologis yang membentuk ketahanan di antara populasi pesisir.

Selain itu, perspektif gender, meskipun ditangani oleh (Fitrianggraeni, 2019) dalam eksplorasinya tentang inisiatif ekonomi perempuan di desa-desa nelayan, tetap marjinal dalam diskusi berorientasi kebijakan yang lebih luas. Kelalaian ini sangat penting, mengingat perempuan memainkan peran integral dalam ekonomi rumah tangga dan rantai nilai perikanan.

Selain itu, (Riniwati et al., 2022) menemukan bahwa strategi pemberdayaan sering mengabaikan pengembangan sumber daya manusia dan kesetaraan gender sebagai penentu pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. Dari sudut pandang kebijakan, ada juga pemahaman yang terbatas tentang bagaimana konservasi laut dan pengentasan kemiskinan berinteraksi. (Gurney et al., 2014) menunjukkan bahwa kawasan konservasi laut terpadu (KKP) dapat secara bersamaan memajukan konservasi dan pemberdayaan ketika dirancang dengan kerangka kerja partisipatif.

Mengacu pada fakta diatas, penelitian melihat bahwa perlu dikaji efektivitas pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Molona dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian sosial ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Memahami pemberdayaan masyarakat sangat varitif, teragntung cara pandang peneliti. Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan salah satu strategi kunci dalam mengatasi kemiskinan pesisir dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, masyarakat pesisir umumnya berada dalam posisi ekonomi yang rentan akibat ketergantungan pada sumber daya alam yang fluktuatif, terbatasnya akses terhadap modal, dan lemahnya dukungan kelembagaan lokal. Oleh karena itu, pemberdayaan bukan sekadar proses ekonomi, tetapi juga transformasi sosial dan kelembagaan yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki kontrol terhadap kehidupan dan sumber daya mereka sendiri (Pomeroy & Andrew, 2011).

Menurut (Béné et al., 2010), pemberdayaan masyarakat nelayan di negara berkembang tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat fungsi sosial seperti solidaritas komunitas dan ketahanan pangan. Mereka menekankan bahwa perikanan skala kecil memiliki peran ganda: sebagai sumber ekonomi sekaligus sebagai sistem sosial yang menopang identitas dan keberlanjutan komunitas pesisir. Dalam kerangka ini, pemberdayaan harus dipahami sebagai proses penguatan kemampuan kolektif masyarakat nelayan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan.

Selanjutnya, (Allison et al., 2009) menyoroti keterkaitan antara kerentanan ekonomi nelayan dengan perubahan iklim global. Mereka menegaskan bahwa pemberdayaan harus memperkuat kapasitas adaptif nelayan terhadap fluktuasi harga, cuaca ekstrem, dan degradasi ekosistem laut. Upaya ini dapat dilakukan melalui diversifikasi mata pencaharian, peningkatan keterampilan, dan akses terhadap informasi pasar. Namun, efektivitas kebijakan semacam ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan institusi lokal yang responsif (Islam & Sallu, 2014).

Kemudian menurut (Lebel et al., 2006) memperluas pandangan ini dengan menekankan pentingnya kapasitas kelembagaan lokal. Dalam model *co-management*, kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat nelayan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya laut. Pendekatan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan sehingga menciptakan rasa memiliki terhadap kebijakan konservasi.

Selain itu, dimensi gender juga perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. (Kleiber et al., 2017) menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran sentral dalam rantai nilai perikanan, terutama dalam pengolahan hasil tangkapan dan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Namun, mereka seringkali terpinggirkan dalam kebijakan perikanan formal. Oleh karena itu, pemberdayaan harus berorientasi pada kesetaraan gender agar mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan secara menyeluruh.

Menurut (Kusnadi, 2003), ada dua menyebabkan kemiskinan nelayan, yaitu sebab yang bersifat internal dan bersifat eksternal. Kedua sebab tersebut saling berinteraksi dan melengkapi. Sebab kemiskinan yang bersifat internal berkaitan erat dengan kondisi internal sumber daya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka. Namun sebagai suatu masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, masyarakat nelayan mempunyai karakteristik sosial terdiri yang berbeda dengan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daratan. Beberapa kawasan pesisir yang relatif berkembang pesat, struktur masyarakatnya bersifat heterogen, memiliki etos kerja tinggi, solidaritas sosial yang kuat, serta terbuka terhadap perubahan dan interaksi sosial. Sekalipun demikian, masalah kemiskinan masih mendera sebagian masyarakat pesisir, sehingga fakta sosial ini terkesan ironi di tengah-tengah kekayaan sumber daya pesisir dan kelautan.

Ada 4 aspek elemen kunci penting dalam proses pemberdayaan masyarakat menurut (Narayan, 2002) yaitu: pertama; Akses Informasi Akses informasi adalah kekuatan yang memungkinkan aliran informasi berlaku dua arah, yaitu dari pemerintah kepada warganya dan dari warga kepada pemerintah. Kedua; Inklusi atau partisipasi yaitu Pendekatan pemberdayaan untuk melibatkan orang miskin sebagai co-produsen melibatkan pemberian kekuasaan dan kontrol atas keputusan serta sumber daya kepada tingkat terendah yang sesuai. Ketiga; Akuntabilitas. Pejabat publik, pegawai pemerintah, promotor dari sektor swasta, wirausahawan, serta para politisi harus diminta untuk bertanggung jawab. Dan keempat; Kapasitas organisasi lokal. Ini berkaitan dengan kemampuan individu untuk berkerja bersama, mengelola diri, dan menggerakkan sumber daya untuk menyelesaikan masalah yang menjadi kepentingan bersama.

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2017) bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertumpu dari filsafat postpositivisme, metode penelitian kualitatif dipakai untuk penelitian yang berfokus kepada kondisi objek yang alamiah. Selain itu menggunakan teknik pengambilan data dengan triangulasi (gabungan), analisis yang bersifat induktif atau kualitatif. Hasil yang diperoleh dari menggunakan penelitian kualitatif sendiri adalah menekankan pada makna dari generalisasi.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, (Creswell, 2015). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang memberikan informasi mengenai topik penelitian, khususnya pemberdayaan masyarakat nelayan tangkap di Desa Molona Kabupaten Buton Selatan. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui sumber tidak langsung, seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumentasi terkait yang relevan dengan topik penelitian serta sumber lainnya yang ada di lokasi penelitian, (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dilakukan menurut (Creswell, 2015) dilakukan dalam empat tahap, mengorganisir data, Reduksi data, Display/penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan untuk melepaskan masyarakat dari kemiskinan atau ketidakberdayaan. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subyek dari pemberdayaan, dan bukan sebagai obyek. Kedudukan masyarakat sebagai subyek menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berusaha agar lebih berdaya, namun tidak cukup hanya masyarakat yang berupaya melainkan perlu dukungan dari berbagai pihak. Upaya yang dilakukan untuk melepaskan masyarakat dari ketidakberdayaan dapat dilakukan melalui pemberian akses informasi, inklusifitas dan partisipasi, akuntabilitas, kapasitas organisasi, (Narayan, 2013); (Narayan, 2002).

Akses Informasi

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa berusaha untuk menjalin komunikasi dua arah dan memberikan bantuan berupa rumpon kepada masyarakat nelayan, dukungan yang diberikan masih terbatas. Penyebaran informasi juga belum merata di seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya penggunaan media komunikasi yang lebih luas, seperti telepon, whatsapp, atau media sosial.

Upaya pemberdayaan masyarakat nelayan tidak dapat dilepaskan dari pentingnya komunikasi dua arah yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi yang menyebabkan distribusi informasi dan bantuan tidak merata. Menurut (Stacey et al., 2021), keberhasilan pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia sangat bergantung pada mekanisme komunikasi partisipatif yang mendorong nelayan menjadi aktor aktif dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya laut. Tanpa komunikasi dua arah yang transparan, partisipasi masyarakat menjadi simbolik dan tidak menghasilkan perubahan substantif terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.

Selanjutnya, (Dudayev et al., 2023) menekankan pentingnya *governance inclusion* dalam tata kelola perikanan partisipatif. Penelitian mereka menunjukkan bahwa program pengelolaan berbasis masyarakat hanya efektif jika terdapat sistem komunikasi yang mampu menjembatani nelayan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-negara. Namun, dalam banyak kasus di Indonesia, komunikasi masih berlangsung secara top-down, sehingga nelayan tidak memiliki saluran untuk menyalurkan aspirasi mereka secara efektif. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di mana kurangnya pemanfaatan media digital seperti WhatsApp atau media sosial menyebabkan keterbatasan akses informasi dan koordinasi antar-nelayan.

Sementara itu (Wiranthi et al., 2025) menambahkan bahwa interaksi dinamis antara aktor negara dan non-negara sangat menentukan efektivitas pemberdayaan di sektor perikanan skala kecil. Mereka menemukan bahwa komunikasi kolaboratif dan transparan merupakan fondasi dari tata kelola adaptif yang mampu meningkatkan kapasitas sosial dan ekonomi nelayan. Tanpa komunikasi yang terbuka, program bantuan seperti penyediaan rumpon seringkali hanya bersifat administratif tanpa menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu, pendekatan komunikasi berbasis teknologi telah terbukti memperkuat kapasitas sosial dalam pengelolaan perikanan. Sebagaimana dikatakan (Rachman et al., 2025) mengembangkan model *Participatory GIS* di wilayah pesisir Jakarta yang memfasilitasi pertukaran informasi secara langsung antara nelayan dan pemerintah melalui platform digital. Hasilnya menunjukkan peningkatan efisiensi tangkapan ikan dan penguatan jaringan sosial nelayan. Studi ini mendukung pentingnya inovasi komunikasi digital sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pesisir di Indonesia.

Dari sisi teori, hasil ini dapat dijelaskan melalui kerangka *interactive governance* (Jentoft & Chuenpagdee, 2015), yang menekankan pentingnya komunikasi timbal balik antara aktor negara dan masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang berkeadilan. Teori ini memandang bahwa pemberdayaan tidak hanya berupa peningkatan kapasitas ekonomi, tetapi juga kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan melalui saluran komunikasi yang inklusif.

Dengan demikian, temuan penelitian Anda memperkuat literatur yang ada dengan menunjukkan bahwa kendala utama pemberdayaan masyarakat nelayan bukan hanya kekurangan modal atau bantuan fisik, tetapi lemahnya infrastruktur komunikasi sosial dan digital. Untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan, pemerintah desa perlu memperkuat sistem komunikasi berbasis teknologi, melatih nelayan dalam literasi digital, serta membangun platform komunikasi partisipatif agar seluruh warga pesisir dapat mengakses informasi dan terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya laut.

Inklusi atau Partisipasi

Inklusi atau partisipasi dalam pendekatan pemberdayaan untuk partisipasi melihat orang-orang miskin sebagai co-produsen. Namun, masyarakat nelayan di Desa Molona belum bisa disebut sebagai co-produsen. Hal ini karena mereka masih menjual ikan segar hasil tangkapan mereka. Proses pembuatan produk lainnya belum berjalan, sebab salah satu BUMDes di desa tersebut belum diaktifkan kembali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat nelayan di Desa Molona belum dapat dikategorikan sebagai co-producer dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka masih berperan sebagai produsen primer yang menjual ikan segar tanpa diversifikasi produk. Kondisi ini terjadi karena belum berfungsinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya menjadi sarana kolaborasi ekonomi dan inovasi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa proses pemberdayaan di Desa Molona masih berorientasi pada bantuan material, bukan pada penguatan kapasitas dan partisipasi kolaboratif. Menurut (Jentoft & Chuenpagdee, 2015), pemberdayaan sejati dalam sektor perikanan kecil membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra sejajar pemerintah, bukan sekadar penerima manfaat.

Dalam konteks co-production, (Ferro de Godoy et al., 2015) menekankan pentingnya integrasi antara pengetahuan ilmiah dan lokal dalam tata kelola pesisir yang adaptif, Namun, di Desa Molona, keterlibatan nelayan masih terbatas pada aktivitas tangkap tanpa inovasi atau pengelolaan pascapanen, menunjukkan lemahnya kolaborasi berbasis pengetahuan lokal. Penelitian (Jentoft & Chuenpagdee, 2015) juga menyoroti bahwa nelayan kecil sering terpinggirkan karena kurangnya akses terhadap informasi dan kelembagaan ekonomi yang mendukung.

Keterbatasan kolaborasi ini juga dipengaruhi oleh faktor struktural. (Sahide et al., 2023) menunjukkan bahwa praktik co-production di Indonesia sering terkendala oleh birokrasi yang hierarkis, sehingga masyarakat hanya berperan pasif. Untuk mengatasi hal ini, pemberdayaan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sosial dan pembelajaran bersama (social learning), sebagaimana disarankan oleh (Santos et al., 2013) yang menekankan pentingnya proses pembelajaran kolektif antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemberdayaan nelayan di Desa Molona masih berada pada tahap partisipasi dasar dan belum berkembang menjadi kemitraan co-production. Pemberdayaan yang berkelanjutan perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan lokal (BUMDes), pembelajaran sosial, dan penggabungan pengetahuan lokal dengan inovasi teknologi agar masyarakat nelayan dapat berperan aktif sebagai produsen bersama dalam pembangunan ekonomi pesisir.

Akuntabilitas

Pemerintah telah menyediakan kartu kusuka sebagai mekanisme akuntabilitas dan jaminan formal bagi nelayan. Kartu kusuka memberikan manfaat berupa, akses bantuan, asuransi nelayan dan Kemudahan rekomendasi bantuan BBM. Namun, jaminan ini belum merata, karena hanya 102 orang nelayan yang menerima kartu tersebut (berdasarkan kriteria tertentu). Selain kartu kusuka, terdapat jaminan alternatif melalui rekomendasi administratif, yang bersifat individual.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyediaan Kartu Kusuka berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas formal yang mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan. Kartu tersebut digunakan untuk mengakses bantuan, perlindungan asuransi, serta kemudahan memperoleh rekomendasi BBM bersubsidi. Dalam kerangka pemberdayaan, kebijakan ini sejalan dengan konsep capacity enabling, yaitu menyediakan instrumen yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kapasitasnya secara ekonomi dan kelembagaan (Ife, 2013).

Namun, keberadaan Kartu Kusuka yang hanya diterima oleh 102 nelayan mengindikasikan adanya ketimpangan distribusi jaminan yang berpotensi menghambat proses pemberdayaan kolektif. Hal ini sesuai dengan temuan Tambunan (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan bergantung pada pemerataan akses terhadap sumber daya publik. Di sisi lain, keberadaan rekomendasi administratif sebagai alternatif jaminan sosial bersifat individual dan tidak menjadi bagian dari sistem perlindungan komunal. Mekanisme ini mencerminkan lemahnya institusionalisasi pemberdayaan, karena pemberdayaan yang efektif seharusnya berlandaskan collective agency kemampuan kelompok untuk memperoleh hak dan mengelola sumber daya secara bersama (Sen, 1999). Keterbatasan akses Kartu Kusuka juga memperkuat pandangan Suharto (2010) bahwa program pemberdayaan seringkali terjebak pada pendekatan administratif yang tidak sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan. Dengan demikian, untuk memperkuat pemberdayaan nelayan, diperlukan kebijakan yang menjamin pemerataan akses Kartu Kusuka, peningkatan literasi administratif nelayan, serta penguatan kelembagaan lokal agar mekanisme jaminan sosial tidak bergantung pada rekomendasi individual yang rawan bias.

Kapasitas Organisasi Lokal

Kerja sama antar aparat desa berjalan dengan baik, ditunjukkan melalui komunikasi aktif, terutama menggunakan media digital seperti WhatsApp dan telepon. Koordinasi dan perencanaan bersama dilakukan secara rutin, termasuk dalam penyusunan dan implementasi program bantuan seperti bantuan keramba bagi masyarakat nelayan. Organisasi lokal, dalam hal ini aparat desa, menunjukkan kapasitas kelembagaan yang kuat, ditandai oleh kemampuan dalam membangun hubungan kerja yang fungsional, menyampaikan informasi secara efektif, dan merancang program secara partisipatif. Kondisi ini mencerminkan pentingnya komunikasi organisasi dalam membangun kerja sama birokrasi yang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kinerja tata kelola pada komunitas nelayan menunjukkan capaian yang berbeda pada masing-masing indikator. Pertama, akses informasi telah berjalan efektif, ditandai dengan komunikasi dua arah yang konsisten antara pemerintah desa dan masyarakat nelayan sehingga aliran informasi dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti secara tepat. Kedua, inklusi dan partisipasi masih berada pada tingkat sub-optimal. Masyarakat nelayan belum berperan sebagai *co-producer* karena keterlibatan mereka masih terbatas pada aktivitas penangkapan dan penjualan ikan segar tanpa partisipasi dalam proses pengolahan maupun produksi bernilai tambah. Ketiga, akuntabilitas berada pada kategori baik, tercermin dari pemanfaatan Kartu Kusuka sebagai instrumen identitas formal yang memudahkan akses terhadap bantuan dan perlindungan sosial. Keempat, kapasitas organisasi lokal menunjukkan kinerja positif melalui adanya kerja sama, koordinasi, dan perencanaan yang efektif untuk mendukung keberlanjutan program bantuan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola informasi, akuntabilitas, dan kapasitas organisasi lokal berada pada kondisi yang kuat, aspek partisipasi masyarakat masih menjadi titik kritis yang memerlukan intervensi strategis agar penguatan pemberdayaan nelayan dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Saran

Untuk memperkuat pemberdayaan nelayan, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu meningkatkan partisipasi nelayan melalui pelatihan pengolahan hasil perikanan, memperkuat kapasitas organisasi lokal dengan pendampingan berkelanjutan, serta mengoptimalkan pemanfaatan Kartu Kusuka sebagai akses layanan dan perlindungan. Forum dialog rutin antara nelayan dan pemerintah perlu diperkuat sebagai ruang komunikasi yang inklusif, sementara kolaborasi lintas pihak pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas perlu terus ditingkatkan untuk menghadirkan inovasi yang relevan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, E. H., Perry, A. L., Badjeck, M.-C., Neil Adger, W., Brown, K., Conway, D., Halls, A. S., Pilling, G. M., Reynolds, J. D., Andrew, N. L., & Dulvy, N. K. (2009). Vulnerability of national economies to the impacts of climate change on fisheries. *Fish and Fisheries*, 10(2), 173–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2008.00310.x>
- Béné, C., Hersoug, B., & Allison, E. H. (2010). Not by Rent Alone: Analysing the Pro-Poor Functions of Small-Scale Fisheries in Developing Countries. *Development Policy Review*, 28(3), 325–358. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2010.00486.x>
- Cahaya, A. (2015). *Fishermen Community in the Coastal Area: A Note from Indonesian Poor Family*. 26(15), 29–33. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00801-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00801-1)
- Chambers, R. (2014). *Rural Development: Putting the last first*. Taylor & Francis. <https://books.google.co.id/books?id=zLeOAwwAAQBAJ>
- Creswell, J. (2015). *Riset Pendidikan (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif)* (terjemahan). Pustaka Pelajar.
- Didi, L. (2024). Alleviating Extreme Poverty Through Community Empowerment Programs. *Advances In Social Humanities Research*. <https://doi.org/10.46799/adv.v2i6.252>
- Dudayev, R., Hakim, L. L., & Rofiati, I. (2023). Participatory fisheries governance in Indonesia : Are octopus fisheries leading the way? *Marine Policy*, 147(September 2022), 105338. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105338>
- Ferro de Godoy, D., Andriolo, A., & de Fatima Filla, G. (2015). The influence of environmental variables on estuarine dolphins (*Sotalia guianensis*) spatial distribution and habitat used in the Estuarine Lagunar Complex of Cananéia, southeastern Brazil. *Ocean & Coastal Management*, 106, 68–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.01.013>
- Fitriangraeni, S. (2019). Building business, enriching lives: an Indonesian initiative to empower women in the fishing communities. *WMU Journal of Maritime Affairs*, 18(4), 595–616. <https://doi.org/10.1007/s13437-019-00181-z>

- Gurney, G. G., Cinner, J., Ban, N. C., Pressey, R. L., Pollnac, R., Campbell, S. J., Tasidjawa, S., & Setiawan, F. (2014). Poverty and protected areas: An evaluation of a marine integrated conservation and development project in Indonesia. *Global Environmental Change*, 26, 98–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.003>
- Harland, Y. S.; L. D. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Petani Penerima Sertifikat Tanah Melalui Program Kredit Usaha Tani Di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton*. 164–173.
- Ife, J. (2013). *Community Development in an Uncertain World*. Cambridge University Press. <https://books.google.co.id/books?id=fZmyAAAAQBAJ>
- Islam, M., & Sallu, S. (2014). Vulnerability of fishery-based livelihoods to the impacts of climate variability and change: insights from coastal Bangladesh. *Regional Environmental Change*, 14, 281–294. <https://doi.org/10.1007/s10113-013-0487-6>
- Jentoft, S., & Chuenpagdee, R. (2015). *Assessing Governability of Small-Scale Fisheries BT - Interactive Governance for Small-Scale Fisheries: Global Reflections* (S. Jentoft & R. Chuenpagdee (eds.); pp. 17–35). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-17034-3_2
- Kleiber, D., Frangoudes, K., Snyder, H. T., Choudhury, A., Cole, S. M., Soejima, K., Pita, C., Santos, A., McDougall, C., Petrics, H., & Porter, M. (2017). *Promoting Gender Equity and Equality Through the Small-Scale Fisheries Guidelines: Experiences from Multiple Case Studies BT - The Small-Scale Fisheries Guidelines: Global Implementation* (S. Jentoft, R. Chuenpagdee, M. J. Barragán-Paladines, & N. Franz (eds.); pp. 737–759). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55074-9_35
- Kusnadi. (2003). *Akar kemiskinan nelayan*. LKiS. <https://books.google.co.id/books?id=nAjf16EMr8gC>
- Latief, J. A., & Wijaya, N. (2025). Exploring the role of local government in empowering small-scale fishing communities in Northern Coastal Jakarta, Indonesia. *Maritime Studies*, 24(3), 49. <https://doi.org/10.1007/s40152-025-00442-z>
- Lebel, L., Anderies, J. M., Campbell, B., Folke, C., Hatfield-dodds, S., Hughes, T. P., & Wilson, J. (2006). *Governance and the Capacity to Manage Resilience in Regional Social-Ecological Systems*. 11(1).
- Narayan, D. (2002). *EMPOWERMENT AND POVERTY REDUCTION* (D. Narayan (ed.)). World Bank.
- Narayan, D. (2013). Measuring empowerment: cross-disciplinary perspectives. In *Choice Reviews Online* (8th ed., Vol. 43, Issue 03). World Bank. <https://doi.org/10.5860/choice.43-1691>
- Pomeroy, R. S., & Andrew, N. L. (2011). *Small-scale fisheries management: Frameworks and approaches for the developing world*.
- Rachman, F., Huang, J., & Suadi. (2025). Assessing the dynamics of small-scale coastal fisheries using public participatory GIS with structural equation model for fisheries management in Jakarta's coastal area, Indonesia. *Ocean & Coastal Management*, 262, 107575. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107575>
- Riniwati, H., Harahab, N., Utami, T. N., Wati, L. A., & Wike. (2022). *Empowerment Human Resources Through the Gender Development Index and Their Impact on Sustainable Development in the Rural Coastal Areas with Dynamic System and Multi-Policy Model BT - Conserving Biocultural Landscapes in Malaysia and Indonesia for Sustainable Development* (S. A. Abdullah, A. S. Leksono, & S.-K. Hong (eds.); pp. 173–193). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7243-9_12
- Sahide, M. A. K., Fisher, M. R., Sirimorok, N., Faturachmat, F., Dhiaulhaq, A., Maryudi, A., Batiran, K. B., & Supratman, S. (2023). Blind spots and spotlights in bureaucratic politics: An analysis of policy co-production in environmental governance dynamics in Indonesia. *Development Policy Review*, 41(5), e12693. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/dpr.12693>
- Santos, R. M., Mertens, G., Salman, M., Cizer, Ö., & Van Gerven, T. (2013). Comparative study of ageing, heat treatment and accelerated carbonation for stabilization of municipal solid waste incineration bottom ash in view of reducing regulated heavy metal/metalloid leaching. *Journal of Environmental Management*, 128, 807–821. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.06.033>
- Sen, A. (2001). *Development as Freedom*. OUP Oxford.

- <https://books.google.co.id/books?id=Qm8HtpFHYecC>
- Stacey, N., Gibson, E., Loneragan, N. R., Warren, C., Wiryawan, B., Adhuri, D. S., Steenbergen, D. J., & Fitriana, R. (2021). Developing sustainable small-scale fisheries livelihoods in Indonesia: Trends , enabling and constraining factors and future opportunities. *Marine Policy*, 132, 104654. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104654>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Alfabeta.
- Sulistiani, A. T. (2017). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media.
- Syahza, A., Tampubolon, D., Asmit, B., & Irianti, M. (2025). Poverty alleviation through cross-sectoral approaches: solutions to accelerate coastal community economy. *Cogent Social Sciences*, 11(1), 2462451. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2462451>
- Wiranthi, P. E., Toonen, H. M., & Oosterveer, P. (2025). Dynamic Interactions and Governance Capabilities of State and Non-State Actors in Small-Scale Tuna Fishery Certification in Indonesia. *Environmental Policy and Governance*, n/a(n/a). <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/eet.70014>